PENGARUH KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

NASKAH PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Syarat Guna Memeperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh :

VERAWATI

B.200 090 003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2013

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini telah membaca naskah publikasi karya ilmiah dengan judul:

PENGARUH KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

Yang ditulis oleh:

VERAWATI
B.200 090 003

Penandatangan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, Juli 2013

Pembimbing

(Dr. Noer Sasongko, SE.,M.Si,AK)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

(Dr. Triyono, SE, M.Si.)

SURAT PERNYATAAN

PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Bismillahirohmanirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya :

Nama	:	VERAWATI
Fakultas	:	Ekonomi dan Bisnis
Jenis	:	Skripsi
Judul	:	**PENGARUH KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

Dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada perpustakaan UMS atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih formatkan,mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tampa meminta ijin kepada saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis /pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menangung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran dalam hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat sesungguhnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, Juli 2013

Yang Menyatakan

(VERAWATI)

PENGARUH KEPERILAKUAN ORGANISASI TERHADAP KEGUNAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

VERAWATI
B 200090003

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

ABSTRAKSI

Pengembangan sistem memerlukan suatu perencanaan dan pengimplementasian yang hati-hati, untuk menghindari adanya penolakan terhadap sistem yang dikembangkan. Suatu keberhasilan implementasi sistem tidak hanya ditentukan pada penguasaan teknis belaka, namun banyak penelitian menunjukkan bahwa fakktor perilaku dari individu pengguna sistem sangat menentukan kesuksesan implementasi (Bodnar dan Hopwood, 1995).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh keperilakuan organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survey. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode total sampling sejumlah 98 responden dari jumlah populasi aparat pemerintah di DPPKAD Kabupaten Karanganyar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan regresi linier berganda menggunakan SPSS Versi 15 untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,982 > 1,986) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,602 > 1,986) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,290 > 1,986) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%).

Untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah maka semua pihak yang ada dalam instansi perlu menyadari pentingnya kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, dan perlu meningkatkan dukungan atasan yang mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah lebih baik dalam suatu instansi.

Kata kunci: *Keperilakuan organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah.*

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari demokrasi dalam menciptakan sebuah sistem akuntansi di daerah. Kesemuanya itu harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan keuangan guna melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik dan budaya diperlukan suatu informasi akuntansi yang akurat yaitu berupa laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Penerapan otonomi daerah seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan berdasarkan manajemen keuangan yang sehat.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya dalam rangka menciptakan otonomi daerah. Oleh karena itu diperlukan suatu sistem akuntansi dan sistem pengelolaan keuangan daerah yang handal dan relevan agar dalam pelaporannya nanti dapat menghasilkan suatau informasi yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan untuk meningkatkan kinerja instansi satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah menunjukkan reformasi pengelolaan keuangan negara. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Undang-

undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Terbitnya Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman-Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*.

Dengan lahirnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi transparan untuk tahun 2007 dan seterusnya. Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan akuntansi terhadap transaksi ekonomi yang terjadi pada bagiannya, sehingga menghasilkan laporan keuangan. Oleh karena itu, pada tahun anggaran 2007 SKPD di setiap Kabupaten mulai berupaya mengimplementasikan sistem akuntansi keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.

Terbitnya Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, berbagai peraturan serta perundang-undangan tersebut diatas diharapkan dapat dijadikan landasan yang

kokoh bagi pengelola keuangan Negara dalam rangka menjadikan *good governance* dan *clean government*. Pelaporan dan pertanggungjawaban mengalami perubahan yang besar. Bentuk Laporan pertanggungjawaban sebelumnya hanya berupa laporan perhitungan APBD, saat ini laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan tersebut merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) .

Penelitian ini akan menguji pengaruh keperilakuan organisasi terhadap Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah sesuai Permendagri No. 59 Tahun 2007 Atas Perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, dimana sistem tersebut mulai diimplementasikan di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini akan menguji pengaruh faktor perilaku organisaional, dalam meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

B. LANDASAN TEORI

1. Keperilakuan Organisasi

Perilaku organisasi adalah studi sistematis tentang tindakan dan sikap yang ditujukan oleh orang-orang dalam organisasi (Robbins, 2005). Tampubolon (2004) mengungkapkan perilaku keorganisasian merupakan studi mengenai perilaku manusia dalam organisasi yang mana dengan menggunakan ilmu pengetahuan tentang bagaimana manusia bertindak dalam

organisasi. Perilaku organisasi ini mendasar pada analisis terhadap manusia yang ditujukan bagi kemanfaatan orang. Secara singkat Luthans (2005) mengemukakan Perilaku organisasi sebagai pemahaman, prediksi, dan manajemen perilaku manusia dalam organisasi. Sikap seseorang dalam merespon suatu inovasi seperti diimplementasikannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh lingkungan di dalam organisasi dan faktor personal yang meliputi afektif dan kognitif. Faktor lingkungan organisasi dapat mempengaruhi jalannya implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baru diimplementasikan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kesuksesan implementasi tersebut. Faktor lingkungan organisasi yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi pelatihan, kejelasan tujuan serta dukungan atasan.

2. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban (Bastian, 2006). Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Sesuai ketentuan peraturan perundangan yang telah ditetapkan, pemerintah daerah berkewajiban untuk membuat Laporan Pertanggung

Jawaban Keuangan yang terdiri dari Laporan Perhitungan Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Nota Perhitungan Anggaran (Tim Pokja, 2001).

Ada berbagai definisi atau pengertian akuntansi yang berasal dari berbagai lembaga dan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengiktisaran transaksi, dan kejadian keuangan, penginterprestasian atas hasilnya, serta laporan. Dari definisi diatas menunjukkan bahwa pengertian akuntansi haruslah menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Apabila dikaji dari entitas penyusunan laporan keuangan, maka akuntansi terbagi menjadi akuntansi sektor privat dan akuntansi sektor publik. Akuntansi yang berkaitan dengan organisasi perusahaan (bisnis) biasanya dikenal dengan akuntansi sektor privat, dan yang berkaitan dengan organisasi pemerintahan atau lembaga *non profit* dikenal dengan akuntansi pemerintahan atau akuntansi sektor publik, karenanya akuntansi keuangan daerah termasuk akuntansi sektor publik.

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas subsistem-subsistem atau kesatuan yang terdiri atas kesatuan yang lebih kecil, yang berhubungan satu sama lain dan mempunyai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah *input* (masukan) menjadi *output* (keluaran). *Input* sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. *Output*–nya adalah laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian

proses ataupun prosedur, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

3. Hipotesis

H_1 : Keperilakuan organisasi (dukungan atasan) berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

H_2 : Keperilakuan organisasi (kejelasan tujuan) berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah

H_3 : Keperilakuan organisasi (pelatihan) berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

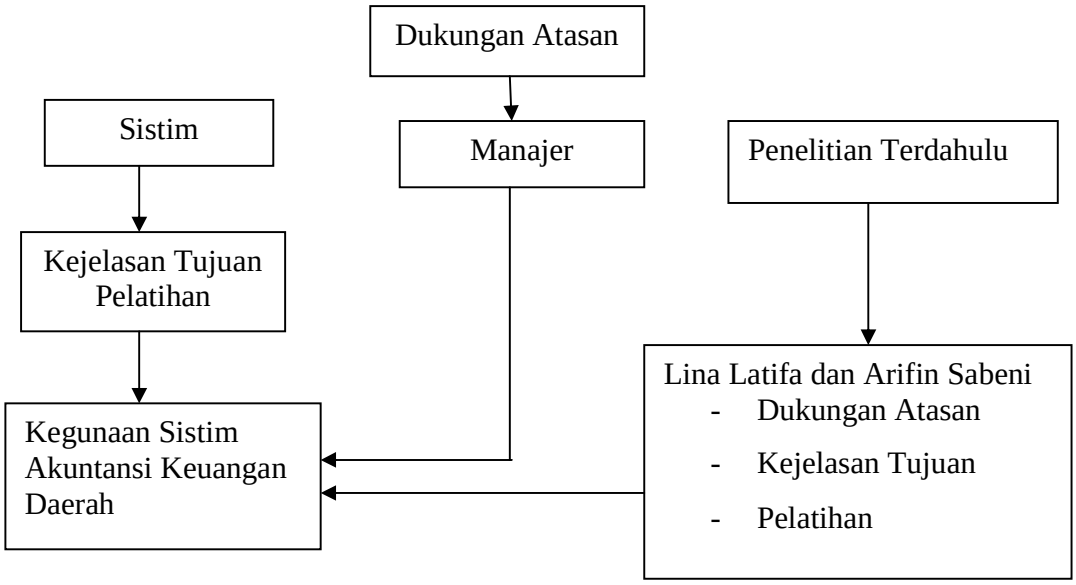

Rerangka Penelitian

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode penelitian survey. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang (Nazir, 1999: 63). Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara berbagai fenomena yang diselidiki.

1. Populasi dan Sampel Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok orang, kejadian, atau minat yang ingin diinvestigasi oleh peneliti (Sekaran, 2006: 121). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengelola SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, sejumlah, tapi tidak semuanya, elemen dari populasi akan membentuk sampel (Sekaran, 2006: 123). Sampel penelitian ini adalah seluruh aparat pemerintah di DPPKAD Kabupaten Karanganyar.

3. Metode Analisis Data

1. Uji Regresi Berganda

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Model ini dipilih karena penelitian dirancang untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Variabel independent dalam penelitian ini adalah keperilakuan organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan) sedangkan variabel dependent adalah kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah. Model persamaan regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah (Djarwanto, 1996: 75):

$SAKD = a + b_1DA_1 + b_2KT_2 + b_3P_3 + e$

Keterangan :

SAKD	=	Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
DA_1	=	Dukungan Atasan
KT_2	=	Kejelasan Tujuan
P	=	Pelatihan
a	=	Konstanta
b_1, b_2,	=	Koefisien regresi
e	=	error

D. HASIL PENELITIAN

Dari hasil pengolahan dengan program SPSS 15.0 *for Windows* di atas dapat disusun persamaan sebagai berikut:

$SAKD = a + b_1DA_1 + b_2KT_2 + b_3P_3 + e$

Tabel IV.9. Hasil Uji Regresi Berganda

Variabel	b	Beta	t_{hitung}	Sig	Kesimpulan
Konstans	12,486				
DA	0,245	0,275	2,982	0,004	**H_1 diterima**
KT	0,374	0,241	2,602	0,011	**H_2 diterima**
P	0,291	0,219	2,290	0,024	**H_3 diterima**
t_{tabel} = 1,985					
F_{hitung} = 11,030	*p* =	0,000			
F_{tabel} = 2,76					
R^2 = 0,260					

Sumber: data primer yang diolah, 2013

$SAKD = 12,486 + 0,245DA + 0,374KT + 0,291P + e$

Interpretasi:

a. Konstanta 12,486 menunjukkan bahwa jika tidak ada keperilakuan organisasi (dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan), maka terdapat kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 12,486.

b. Koefisien regresi dukungan atasan sebesar 0,245 dengan parameter positif artinya, apabila ada kenaikan variabel dukungan atasan sebesar satu satuan akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 0,245 dengan asumsi variabel yang lain tetap.
c. Koefisien regresi kejelasan tujuan sebesar 0,374 dengan parameter positif artinya, apabila ada kenaikan variabel kejelasan tujuan sebesar satu satuan akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 0,374 dengan asumsi variabel yang lain tetap.
d. Koefisien regresi pelatihan sebesar 0,291 dengan parameter positif artinya, apabila ada kenaikan variabel pelatihan sebesar satu satuan akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar sebesar 0,291 dengan asumsi variabel yang lain tetap.

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel IV.8. dengan menggunakan program SPSS 15.0 *for Windows*, variabel dukungan atasan mempunyai nilai beta lebih besar dibandingkan dengan variabel lainnya yaitu sebesar 0,275, maka dapat disimpulkan bahwa variabel dukungan atasan mempunyai pengaruh kuat (dominan) terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

E. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,982 > 1,986) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel dukungan atasan hipotesis **H_0 ditolak** artinya bahwa dukungan atasan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
2. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,602 > 1,986) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel kejelasan tujuan hipotesis **H_0 ditolak** artinya bahwa kejelasan tujuan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,290 > 1,986) dan nilai probabilitas < 0,05 (taraf signifikansi 5%), maka untuk variabel pelatihan hipotesis **H_0 ditolak** artinya bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

Keterbatasan penelitian ini adalah Peneliti hanya mengambil 3 variabel independen yaitu dukungan atasan, kejelasan tujuan dan pelatihan, sebagai variabel bebas yang mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.

Dan Peneliti hanya mengambil SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar saja sebagai populasi dalam penelitian ini.

Implikasi terkait dengan hasil penelitian ini adalah:

1. Agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang dikirim benar-benar diisi oleh objek yang diinginkan peneliti maka penelitian selanjutnya seharusnya memperkuat dengan metode wawancara atau observasi secara langsung.
2. Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menambah sampel tidak hanya pada Pemerintah Kabupaten Karangnayar saja tetapi mungkin dengan sampel seluruh SKPD akan didapatkan hasil penelitian yang lebih baik.
3. Untuk meningkatkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah maka semua pihak yang ada dalam instansi perlu menyadari pentingnya kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut, dan perlu meningkatkan dukungan atasan yang mendukung sepenuhnya dalam mewujudkan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah lebih baik dalam suatu instansi. Selain itu bagi peneliti selanjutnya agar dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Karanganyar.